

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIA JASA
FUMIGASI PT. PACIFIC INDO PACKING MAKASSAR
DENGAN PT. PP. LONDON SUMATRA INDONESIA
DAN AKIBAT HUKUMNYA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

TIAR ROULDIAZ FARROSY

C 100 160 009

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIA JASA
FUMIGASI PT. PACIFIC INDO PACKING MAKASSAR
DENGAN PT. PP. LONDON SUMATRA INDONESIA
DAN AKIBAT HUKUMNYA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

TIAR ROULDIAZ FARROSY

C 100 160 009

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



Nuswardhani, S.H., S.U

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIA JASA
FUMIGASI PT. PACIFIC INDO PACKING MAKASSAR
DENGAN PT. PP. LONDON SUMATRA INDONESIA
DAN AKIBAT HUKUMNYA**

OLEH :

TIAR ROULDIAZ FARROSY

C100.160.009

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Kamis, 18 Juni 2020

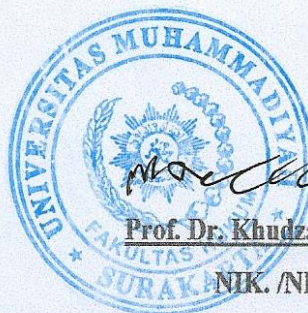
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina B, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H

NIK. /NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan secara penuh.

Surakarta, April 2020

Penulis,



Tiar Rouldiaz Farrosy
C 100 160 009

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIA JASA
FUMIGASI PT. PACIFIC INDO PACKING MAKASSAR
DENGAN PT. PP. LONDON SUMATRA INDONESIA
DAN AKIBAT HUKUMNYA**

Abstrak

Dalam dunia perdagangan terdapat regulasi-regulasi tertentu yang harus dipatuhi oleh pelaku dagang dalam menjalankan kegiatannya. Peraturan di Indonesia mengatur bahwa pada perdagangan dalam sektor pertanian diharuskan melakukan fumigasi pada kemasan kayu hasil produksi yang akan didistribusikan baik dalam negeri maupun luar negeri. PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit dan karet. Untuk mendistribusikan hasil produksinya dan melaksanakan regulasi dari Menteri Pertanian, maka PT. PP. London Sumatra Indonesia melakukan kerjasama dengan PT. Pacific Indo Packing Makassar perusahaan yang memberikan pelayanan di bidang Layanan Fumigasi dan Kemasan Kayu untuk Export serta Pengendalian Hama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan perjanjian kerjasama antara dua perusahaan tersebut, hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku pada perusahaan tersebut dan akibat hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu meneliti aspek hukum, aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dengan jelas mengenai proses pelaksanaan perjanjian kerjasama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses perjanjian kerjasama diawali dengan pembentukan perjanjian kerjasama yang disertai pelengkapan syarat administrasi dan syarat sah perjanjian. Pada saat terjadinya perjanjian ditandai dengan kesepakatan antara dua pihak dengan menandatangani akta perjanjian. Kemudian pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan kerjasama haruslah memperhatikan ketentuan Undang-Undang dimana hak dan kewajibannya telah jelas dan dapat dipenuhi oleh para pihak. Dari hasil perjanjian menimbulkan akibat hukum dapat berupa terpenuhinya prestasi atas perjanjian kerjasama atau telah dilaksanakan semua hak dan kewajiban dari para pihak. Apabila akibat kesalahan salah satu pihak menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban maka dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti kerugian kepada pihak yang tidak memenuhi hak dan kewajiban atas dasar wanprestasi pasal 1243 KUHPerdata. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan hukum pada saat pelaksanaan kerjasama, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata dan diselesaikan melalui pengadilan dimana perjanjian tersebut dibuat atau dapat diatur lain penyelesaiannya dalam isi perjanjian kerjasama.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama Penyedia Jasa, Hak dan Kewajiban, Akibat Hukum.

Abstract

In the world of trade there are certain regulations which must be obeyed greenback. trade in exercised their activities had Law that arranged in the trading in the agricultural sector are required to do fumigation around of production that is the result of the good will be distributed at national or international. Plantation Company London Sumatra Indonesia is the company in oil palm plantation industry and rubber plantations. To distribute it and implement regulations of agriculture minister then PT. PP. London Sumatra Indonesia cooperation with the Pacific Indo Packing Makassar Company that providing services in the field and packaging services fumigation wood for export and pest control. This study aims to analyze the company partnership agreement between two companies. Process of making cooperation agreements between shall be according to the provision as stated in the book of the civil code to declare the agreement shall be valid if it fulfilled the criteria the validity of the agreement. The method of approach used in this study is normative, which examines aspects of law, the rule of law relating to cooperation agreements. This research is descriptive in nature, which is to describe clearly the process of implementing a cooperative agreement. The results showed that in the cooperation agreement process begins with the establishment of a cooperation agreement that is accompanied by the completion of administrative requirements and legal terms of the agreement. At the time of the agreement is marked by an agreement between the two parties by signing the deed of agreement. And then fulfilling the rights and obligations of the parties conducting cooperation, they must pay attention to the provisions in Law, where their rights and obligations are clear and can be fulfilled by the parties. From the result of the agreement, the legal consequences can be in the form of fulfillment of the achievement of the cooperation agreement or all rights and obligations of the parties have been carried out. If there is a default or non-fulfillment of the rights and responsibilities of one of the parties due to the fault of one of the parties, then accountability can be held to those who do not fulfill their rights and obligations. If one party commits an illegal act during the implementation of the cooperation, then it can be settled through the court where the agreement was made or other arrangements can be arranged in the contents of the cooperation agreement.

Keyword: Service Providers Cooperation Agreement Fumigation, Rights and Obligations, Legal Consequences.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan di Indonesia berkembang sangat luas sehingga cakupannya bukan hanya antar daerah ataupun di dalam negeri saja (skala nasional), melainkan juga antar negara (skala internasional). Pada perdagangan skala internasional mayoritas perusahaan penghasil barang perdagangan menggunakan transportasi udara dan transportasi laut dalam proses pengiriman ke negara-negara tujuan (ekspor). Dalam transportasi laut yaitu menggunakan sarana kapal-kapal kargo yang bermuatan besar untuk penyaluran perdagangan. Muatan kapal kargo

biasanya dikemas menggunakan peti kemas yang sesuai dengan ketentuan pengangkutan kapal laut, hal ini bertujuan agar pada saat bongkar muat barang tidak terjadi kerusakan dan memudahkan perpindahan barang dari darat ke atas kapal. Kebijakan lain dalam penyaluran barang perdagangan internasional melalui kapal laut yaitu setiap pengemasan barang atau proses packing harus terlebih dahulu disterilkan dari resiko hama yang dapat dibawa oleh kemasan, peti kemas, atau kontainer-kontainer kargo. Proses sterilisasi tersebut tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan telah ditetapkan oleh *International Standards For Phytosanitary Measures* (ISPM), adalah suatu ketentuan yang dirumuskan oleh PBB yang mengatur tentang standar kesehatan tumbuhan dalam perdagangan internasional.

Perusahaan penghasil barang perdagangan tidak dapat melakukan proses sterilisasi sendiri, karena pelaksanaan sterilisasi kemasan, peti kemas, atau kontainer-kontainer kargo dilakukan oleh perusahaan yang telah terdaftar dan memiliki ijin khusus untuk melakukan sterilisasi. Maka dengan itu perusahaan-perusahaan yang akan melakukan ekspor hasil produksinya akan membuat kerjasama dengan perusahaan sterilisasi hama. Pada penelitian ini perusahaan penghasil barang adalah PT. PP. London Sumatra Indonesia, kemudian perusahaan penyedia jasa fumigasi adalah PT. Pacific Indo Packing Makassar. Para pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan membuat dan mengatur ketentuan-ketentuan sendiri dalam perjanjian yang mereka adakan.¹ Dalam perjanjian kerjasama dibuat kesepakatan antara para pihak, dimana kesepakatan itu nantinya akan menimbulkan hubungan hukum. Jika perjanjian kerjasama tersebut dilanggar oleh salah satu pihak karena kesalahannya tidak memenuhi kewajiban yang disepakati atau melanggar peraturan-peraturan yang berlaku dengan kata lain salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, Maka pihak tersebut harus bertanggungjawab dengan mengganti kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

¹ Maria Anggita Dian Pramestie dan Jamal Wiwoho, Jurnal Repertorium, Vol. I, No. 2 Juli – Desember 2017, “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pemberian Kredit (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.” Di Surakarta. Hlm. 115.

- a. Untuk mengetahui proses perjanjian kerjasama antara penyedia jasa fumigasi PT. Pacific Indo Packing Makassar dengan PT. PP. London Sumatra Indonesia.
- b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban dalam peraturan perjanjian kerjasama antara penyedia jasa fumigasi PT. Pacific Indo Packing Makassar dengan PT. PP. London Sumatra Indonesia.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian kerjasama antara PT. Pacific Indo Packing Makassar dengan PT. PP. London Sumatra Indonesia.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah aspek hukum, aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama antara PT. Pacific Indo Packing Makassar dengan PT. PP. London Sumatra Indonesia.

Menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif adalah penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu permasalahan tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.² Dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang proses pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Pacific Indo Packing Makassar dengan PT. PP. London Sumatra Indonesia.

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu proses mencari, menghimpun, dan mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan dan literature lain yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama. Serta studi lapangan yaitu tahap pengumpulan data secara langsung terhadap obyek penelitian guna memperoleh data primer.

Metode analisis menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi

² Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 36.

peraturan perundang-undangan, literature, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama yang kemudian dikaitkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan tentang perjanjian kerjasama, dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Perjanjian Kerjasama Antara Penyedia Jasa Fumigasi PT. Pacific Indo Packing Makassar Dengan PT. PP. London Sumatra Indonesia

Antara PT. PP. London Sumatra Indonesia dengan PT. Pacific Indo Packing Makassar terjalin komunikasi antara kedua belah pihak yang kemudian melakukan negosiasi tentang hal-hal yang akan dilaksanakan dalam perjanjian kerjasama. Negosiasi antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dilakukan dengan menentukan pasal-pasal yang akan disepakati oleh kedua belah pihak, serta hal-hal yang terkait dalam segala kegiatan kerjasama antara perusahaan tersebut. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa *“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*³

Dalam melakukan perjanjian kerjasama, sebelumnya harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Suatu kesepakatan dalam perjanjian sewa–menyewa yang diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPERdata idealnya dilakukan tanpa adanya paksaan, penipuan dan kekhilafan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

³ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kecakapan diatur dalam pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara. Kecakapan merupakan syarat umum agar dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.⁴

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebutkan dalam pasal 1320 ayat (3) KUHPerdara, dimana suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal terdapat di dalam pasal 1320 ayat (4), yaitu yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Karena Perusahaan PT. Pacific Indo Packing Makassar dalam kegiatan usahanya sebagai penyedia jasa fumigasi yang berhubungan dengan melakukan sterilisasi pada setiap pengemasan barang yang akan diperdagangkan sesuai dengan ISPM, maka PT. PP. London Sumatra Indonesia dalam kegiatan perdagangannya bergantung pada pelayanan perusahaan penyedia jasa fumigasi seperti PT. Pacific Indo Packing Makassar. Karena hubungan yang saling membutuhkan tersebut kemudian PT. PP. London Sumatra Indonesia melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Pacific Indo Packing Makassar untuk menunjang kegiatan usaha masing-masing perusahaan. Dengan membuat perjanjian para pihak seakan-akan menetapkan Undang-undang bagi mereka sendiri, karena memang sifatnya lain dengan Undang-Undang yang dibuat oleh Pembentuk Undang-Undang yang sifatnya mengikat umum.⁵

3.2 Hak dan Kewajiban Dalam Peraturan Perjanjian Kerjasama Antara Penyedia Jasa Fumigasi PT. Pacific Indo Packing Makassar Dengan PT. PP. London Sumatra Indonesia

3.2.1 Peraturan hak dan kewajiban

⁴ Prof. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 17

⁵ J Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, hlm.

Perjanjian yang memuat tentang pelayanan jasa menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Pada perjanjian kerjasama penyedia jasa fumigasi ini pihak PT. PP. London Sumatra Indonesia berlaku sebagai konsumen, dan Pihak PT. Pacific Indo Packing Makassar berlaku sebagai pelaku usaha. Hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha yang dapat dipenuhi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun didalam perjanjian kerjasama dapat pula diatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain yang disepakati bersama, selama hak dan kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta keputusan dan kesusilaan.

3.2.2 Hak dan Kewajiban PT. PP. London Sumatra Indoneisa

Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban PT. Pacific Indo Packing Makassar meliputi:

A. Hak

- Berhak menerima informasi tentang tempat, waktu, serta informasi lain yang diperlukan tentang pelaksanaan perlakuan dan sertifikasi, sekurang-kurangnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum pekerjaan dimulai. (pasal 4 perjanjian kerjasama)
- Berhak untuk menerima biaya jasa sebesar Rp. 70.000,- / pallet / crate. Biaya tersebut belum termasuk Ppn 10%. (pasal 9 ayat 1 perjanjian kerjasama)
- Berhak mendapatkan pembayaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah invoice diterima secara lengkap dan benar. Pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening PT. PACIFIC INDO PACKING – Makassar dengan No. rekening 0128598992 melalui BNI Kantor Capem UHNAS Baraya – Makassar. (pasal 10 perjanjian kerjasama)

B. Kewajiban

- Berkewajiban melaksanakan pekerjaan perlakuan dan sertifikasi (marking) sesuai dengan ISPM #15. (pasal 3 perjanjian kerjasama)

- Berkewajiban menerbitkan sertifikat ISPM #15 dan diserahkan kepada PT. PP. London Sumatra Indonesia selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan Pekerjaan dilakukan. (pasal 5 perjanjian kerjasama)
- Berkewajiban memberikan garansi kepada PT. PP. London Sumatra Indonesia atas pekerjaan yang telah dilakukan. (pasal 11 perjanjian kerjasama)

3.2.3 Hak dan Kewajiban PT. PP. London Sumatra Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian, ketebtu-an-ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban PT. PP. London Sumatra Indonesia meliputi:

A. Hak

- Berhak untuk menerima jasa pekerjaan perlakuan dan sertifikasi (marking) sesuai dengan ISPM #15 yang dilakukan oleh PT. Pacific Indo Packing Makassar. (pasal 3 perjanjian kerjasama)
- Berhak untuk menerima sertifikat ISPM #15 yang diserahkan oleh PT. Pacific Indo Packing Makassar selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan Pekerjaan dilakukan. (pasal 5 perjanjian kerjasama)
- Berhak untuk menerima garansi atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Pacific Indo Packing makassar. (pasal 11 perjanjian kerjasama)

B. Kewajiban

- Berkewajiban memberikan informasi tentang tempat, waktu, serta informasi lain yang diperlukan tentang pelaksanaan perlakuan dan sertifikasi kepada PT. Pacific indo packing makassar sekurang-kurangnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum pekerjaan dimulai. (pasal 4 perjanjian kerjasama)
- Berkewajiban membayar biaya jasa sebesar Rp. 70.000,- / pallet / crate. Biaya tersebut belum termasuk Ppn 10% kepada PT. Pacific Indo Packing Makassar. (pasal 9 ayat 1 perjanjian kerjasama)

- Berkewajiban melakukan pembayaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah invoice diterima secara lengkap dan benar. Pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening PT. PACIFIC INDO PACKING – Makassar dengan No. rekening 0128598992 melalui BNI Kantor Capem UHNAS Baraya – Makassar. (pasal 10 perjanjian kerjasama)

Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui hak dan kewajiban bagi konsumen yaitu PT. PP. London Sumatra Indonesia serta hak dan kewajiban bagi pelaku usaha yaitu PT. Pacific Indo Packing Makassar. Hak dan kewajiban tersebut telah dibuat dan disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa hak dan kewajiban dalam akta perjanjian kerjasama telah dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya karena perjanjian kerjasama telah berakhir dan semua prestasinya telah terpenuhi.

3.3 Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Penyedia Jasa Fumigasi PT. Pacific Indo Packing Makassar Dengan PT. PP. London Sumatra Indonesia.

3.3.1 Akibat Hukum

Akibat hukum dari perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan sedangkan kewajiban merupakan suatu beban.⁶ Dari hasil penelitian akibat hukum dari perjanjian kerjasama yaitu hak dan kewajiban masing-masing pihak telah dilaksanakan dan telah dipenuhi prestasinya baik oleh pihak PT. Pacific Indo Packing Makassar maupun pihak PT. PP. London Sumatra Indonesia sesuai dengan isi perjanjian kerjasama.

3.3.2 Tanggung Jawab Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, tanggungjawab hukum muncul apabila salah satu pihak melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban didasarkan atas pelaksanaan kewajiban

⁶ I Gusti Ngurah Anom, Jurnal Advokasi Vol 5 No. 2 September 2015, *Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*.

yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya⁷ (wanprestasi) atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian⁸ (perbuatan melawan hukum).

Sehingga apabila dalam pelaksanaan hak dan kewajiban namun tidak terpenuhi akibat keadaan memaksa, maka tidak ada pertanggungjawabannya oleh para pihak.

Apabila terjadi perselisihan-perselisihan lain diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan termasuk perbuatan melawan hukum, maka akan dilakukan musyawarah antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama untuk mencapai mufakat tetapi bila tidak ditemukan jalan keluarnya akan diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Dari hasil penelitian tidak terdapat perbuatan melawan hukum oleh para pihak, baik pihak PT. Pacific Indo Packing Makassar maupun pihak PT. PP. London Sumatra Indonesia pada saat pelaksanaan perjanjian kerjasama. Sehingga tidak ada pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan oleh para pihak karena perjanjian telah terlaksana dan tidak ada ketentuan yang dilanggar.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Proses terjadinya perjanjian kerjasama antara penyedia jasa PT. Pacific Indo Packing Makassar dengan PT. PP. London Sumatra Indonesia pada perjanjian kerjasama tersebut ada 3 proses yang dilalui para pihak untuk terbentuknya perjanjian kerjasama, yaitu:

- a. Sebelum adanya perjanjian, dilakukan negosiasi yaitu merupakan proses untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu perjanjian kerjasama, dimana para pihak saling memberikan masukan tentang maksud dan tujuan satu sama lain.

⁷ M. Yahya Harahap, 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm. 6.

⁸ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana FH UI, hlm. 117.

- b. Proses selanjutnya adalah pada saat terjadinya perjanjian, dalam proses ini para pihak mencapai kesepakatan dalam perjanjian dan para pihak sudah menandatangani akta perjanjian kerjasama yang telah dibuat PT. Pacific Indo Packing Makassar. Terjadinya suatu perjanjian yaitu pada saat tercapainya kesepakatan terhadap kehendak para pihak, yaitu PT. Pacific Indo Packing Makassar dengan PT. PP. London Sumatra Indonesia.
- c. Proses setelah terjadinya perjanjian, maka timbulah hubungan hukum antara PT. Pacific Indo Packing Makassar dengan PT. PP. London Sumatra Indonesia untuk melaksanakan perjanjian kerjasama penyedia jasa fumigasi. Pada proses ini berisi tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama yaitu pemenuhan hak dan kewajiban yang ditanggung masing-masing pihak. Perjanjian kerjasama antara PT. Pacific Indo Packing Makassar dengan PT. PP. London Sumatra Indonesia dibuat secara tertulis, hal ini dimaksudkan apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama timbul kesalahan, para pihak dapat kembali mengacu pada isi perjanjian yang telah disepakati bersama yang memiliki sifat mengikat para pihak yang membuatnya.

Hak dan kewajiban dalam perjanjian kerjasama antara penyedia jasa fumigasi PT. Pacific Indo Packing Makassar dengan PT. PP. London Sumatra Indonesia, yaitu:

- a. PT. Pacific Indo Packing Makassar berkewajiban melaksanakan pekerjaan perlakuan dan sertifikasi kemudian menerbitkan sertifikat ISPM # 15 dan memberikan garansi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Hak PT. Pacific Indo Packing Makassar yaitu berhak mendapatkan informasi tentang tempat, waktu, serta informasi lain yang diperlukan tentang pelaksanaan perlakuan dan sertifikasi), dan menerima pembayaran.
- b. PT. PP. London Sumatra Indonesia berkewajiban untuk memberikan informasi tentang tempat, waktu, serta informasi lain yang diperlukan

tentang pelaksanaan perlakuan dan sertifikasi, membayar biaya jasa pelayanan. Hak PT. PP. London Sumatra Indonesia yaitu berhak mendapatkan pelayanan perlakuan dan sertifikasi yang kemudian menerima sertifikat kemudian berhak mengajukan klaim garansi.

Bahwa dari pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut kedua belah pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebagaimana mestinya seperti apa yang telah disepakati kedua belah pihak, sehingga prestasinya telah dipenuhi. Dalam penentuan hak dan kewajiban para pihak, perjanjian kerjasama mengacu pada Undang-undnag No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada pasal 4, 5, 6, 7 yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Akibat hukum perjanjian kerjasama tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati para pihak. Seluruh prestasi telah dipenuhi dan tidak ada hak atau kewajiban yang dilanggar serta tidak ada perbuatan-perbuatan para pihak yang melanggar peraturan, norma atau kesusilaan. Maka tidak ada tanggungjawab hukum yang harus dilakukan oleh salah satu pihak akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Dengan demikian perjanjian kerjasama tersebut dinyatakan telah selesai. Namun jika salah satu pihak merasa dirugikan karena kesalahan pihak lainnya sehingga tidak memenuhi kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan atau karena salah satu pihak melanggar peraturan-peraturan yang berlaku, maka ia dapat menuntut ganti rugi ke Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi (pasal 1243 KUHPerdara) dan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdara).

4.2 Saran

1. Bagi Perusahaan (PT. PP. London Sumatra Indonesia dan PT. Pacific Indo Packing Makassar)

Pada penelitian yang telah dilakukan mendapatkan kesimpulan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian saran yang dapat disampaikan adalah bagi perusahaan PT. PP. London Sumatra Indonesia dan PT. Pacific Indo Packing Makassar apabila dikemudian hari

melakukan perjanjian kerjasama, agar tetap mempertahankan proses pembuatan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian yang baik, sehingga menciptakan perjanjian atau hubungan hukum yang baik pula. Namun apabila terdapat pembaharuan peraturan-peraturan yang berlaku diharapkan pula bagi para pihak dapat mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku demi menjaga kepastian hukum dalam perjanjian kerjasama.

2. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan saran bagi masyarakat umum agar memahami bagaimana proses perjanjian yang baik dan benar. Hal ini diharapkan apabila suatu waktu masyarakat umum yang akan melakukan perjanjian khususnya dalam perjanjian kerjasama dapat menentukan kesepakatan-kesepakatan yang tidak bertentangan dengan peraturan, norma kepatutan ataupun kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Rosa. 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana FH UI.

I Gusti Ngurah Anom, Jurnal *Advokasi* Vol 5 No. 2 September 2015, *Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Maria Anggita Dian Pramestie dan Jamal Wiwoho, Jurnal *Repertorium*, Vol. I, No. 2 Juli – Desember 2017, *“Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pemberian Kredit (Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.”* Di Surakarta.

Satrio, J. 1999, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Sunggono, Bambang. 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Yahya Harahap, M. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.